

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Implementasi Akuntansi Sektor Publik

Implementasi akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntansi sektor publik mencakup penyusunan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang relevan dan akurat untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada public. Menurut Biduri (2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi public.

Implementasi akuntansi sektor publik di pemerintah daerah merupakan langkah krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Akintoye & Skelcher, 2017). Melalui implementasi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan standar

akuntansi, mengadopsi praktik terbaik, dan memperkuat proses pelaporan keuangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi sektor publik di instansi pemerintah daerah, antara lain:

- a) Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah dapat memengaruhi implementasi akuntansi sektor publik. Kebijakan yang jelas dan mendukung akan memberikan panduan bagi penerapan standar akuntansi yang relevan.
- b) Infrastruktur Teknologi Informasi: Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat penting dalam mendukung implementasi akuntansi sektor publik. Sistem informasi yang canggih dapat mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan.
- c) Kompetensi SDM: Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh staf di instansi pemerintah daerah juga mempengaruhi implementasi akuntansi sektor publik. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal akuntansi sektor publik dapat meningkatkan efektivitas implementasi.
- d) Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas akan memfasilitasi implementasi akuntansi sektor publik. Budaya yang kuat dalam

mendukung perubahan dan inovasi akan membantu mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi.

- e) Ketersediaan Sumber Daya Keuangan: Implementasi akuntansi sektor publik memerlukan sumber daya keuangan yang cukup, termasuk anggaran untuk investasi dalam infrastruktur, pelatihan SDM, dan pemeliharaan sistem informasi.

2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas memuat informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah daerah (Puspitasari *et al.*, 2018).

Definisi Zulfia (2019), Kualitas laporan keuangan pemerintah mencakup keandalan, relevansi, keterbandingan, keterbacaan, dan ketepatan waktu dalam penyajian informasi keuangan yang dapat dipercaya bagi pengguna laporan tersebut. Sedangkan definisi dari Aryani & Susanti., (2020) Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah tingkat kepastian dan relevansi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Faktor-faktor tersebut adalah beberapa di antara banyaknya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Studi-studi

yang dilakukan dalam jurnal-jurnal memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah:

1. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang tepat dan konsisten menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan ini mencakup pemilihan metode akuntansi, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan. Ketika kebijakan akuntansi diterapkan dengan baik, akan meningkatkan keandalan, relevansi, dan konsistensi laporan keuangan.

2. Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif penting untuk memastikan keandalan laporan keuangan pemerintah. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah kesalahan, penyalahgunaan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kualitas laporan keuangan pemerintah juga dipengaruhi oleh kompetensi dan keahlian sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan audit laporan keuangan. Sumber daya manusia

yang terlatih dan memahami standar akuntansi akan mampu menyajikan informasi keuangan dengan lebih baik.

4. Sistem Informasi Keuangan

Kualitas sistem informasi keuangan pemerintah, termasuk keandalannya dalam memproses data keuangan, dapat berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan. Sistem informasi yang efektif dapat memastikan integritas, akurasi, dan ketersediaan data keuangan yang diperlukan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan antara kualitas laporan keuangan pemerintah dan kinerja instansi pemerintah:

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Kualitas laporan keuangan pemerintah yang tinggi menunjukkan tingkat transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang transparan akan meningkatkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik dan pemangku kepentingan tentang penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik.

6. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas juga memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada manajemen instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki data keuangan yang dapat dipercaya dan informatif, instansi pemerintah dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan efektif.

7. Peningkatan Kepercayaan Publik

Kualitas laporan keuangan pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Publik akan lebih percaya dan memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab dan transparan.

8. Pemenuhan Kewajiban Hukum dan Peraturan

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas juga memastikan pemenuhan kewajiban hukum dan peraturan terkait pelaporan keuangan. Instansi pemerintah yang mematuhi standar akuntansi dan regulasi pelaporan keuangan akan mendapatkan reputasi yang baik dan terhindar dari potensi sanksi atau masalah hukum.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas hasil-hasil kinerja yang

dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, evaluasi kinerja secara terbuka, dan pertanggungjawaban terhadap publik dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah mengacu pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan organisasi (Siahaan *et al.*, 2019). Akuntabilitas ini penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil serta mencapai hasil yang diharapkan.

Mekanisme akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup serangkaian proses dan instrumen yang dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan dengan efektif dan efisien. Mekanisme akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

1) Sistem Pengawasan Internal:

Mekanisme ini mencakup proses internal yang dirancang untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja instansi pemerintah secara teratur. Ini melibatkan audit internal, evaluasi program, dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal.

2) Audit Eksternal:

Audit eksternal dilakukan oleh lembaga independen, seperti badan pemeriksa keuangan, untuk menilai keandalan, keterbacaan, dan kesesuaian laporan keuangan pemerintah. Ini memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik secara tepat.

3) Evaluasi Kinerja:

Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Ini melibatkan pengukurankinerja, analisis hasil, dan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.

4) Pelaporan Publik:

Pelaporan publik adalah mekanisme yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan menyediakan informasi tentang kinerja dan pengelolaan sumber daya publik, pelaporan publik memungkinkan pemantauan oleh publik dan pemangku kepentingan.

5) Partisipasi Masyarakat:

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi mekanisme penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diantaranya adalah :

- Kejelasan Tujuan dan Sasaran
- Ketika tujuan dan sasaran instansi pemerintah jelas dan terukur, akan lebih mudah untuk menilai kinerja dan akuntabilitas. Kejelasan ini memberikan landasan yang kuat bagi instansi pemerintah dalam mengukur pencapaian hasil dan pertanggungjawaban.
- Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya
Transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kebijakan pengelolaan, merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Publikasi informasi yang terbuka akan memungkinkan pemantauan oleh publik dan pemangku kepentingan.
- Independensi Lembaga Pengawas
Keberadaan lembaga pengawas independen, seperti lembaga audit atau ombudsman, dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menyediakan pengawasan yang tidak bias dan objektif.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena mendorong transparansi, pertanggungjawaban, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

➤ Penghargaan dan Sanksi

Adanya sistem penghargaan dan sanksi yang jelas bagi kinerja instansi pemerintah dapat mendorong akuntabilitas dengan memberikan insentif untuk pencapaian kinerja yang baik dan mengurangi risiko pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Pentingnya akuntabilitas kinerja sangatlah besar dalam konteks manajemen organisasi, baik itu sektor publik maupun swasta. Akuntabilitas kinerja mengacu pada kewajiban individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas hasil kerja mereka, termasuk pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja:

➤ Transparansi:

Akuntabilitas kinerja memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara terbuka dan transparan. Dengan

mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka, organisasi dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pelanggan, atau masyarakat umum.

➤ **Peningkatan Kinerja:**

Ketika individu atau organisasi bertanggung jawab atas kinerjamereka, ini mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien untuk mencapai tujuan mereka. Akuntabilitas kinerja menciptakan insentif untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas.

➤ **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:**

Dengan adanya akuntabilitas kinerja, manajer dan pemimpin organisasi dapat menggunakan informasi tentang kinerja masa lalu untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Mereka dapat mengevaluasi apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, serta mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.

➤ **Percaya dan Legitimitas:**

Organisasi yang menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan mereka, seperti pelanggan, investor, dan

pemerintah. Ini membantu memperkuat legitimasi organisasi di mata masyarakat.

➤ Pengendalian Risiko:

Dengan memantau dan mengevaluasi kinerja secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin timbul dan mengambil tindakan pencegahan atau korektif sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

4. System Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku (Chen *et al.*, 2017). Dalam konteks ini, sistem pengendalian intern berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi hubungan antara implementasi akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang direncanakan, terpadu, dan sistematis yang diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan yang berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Albrecht *et al.*, (2008) Mengartikan sistem pengendalian intern sebagai "seperangkat prosedur-prosedur yang direncanakan untuk membantu manajemen mencapai tujuan organisasi dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Peran sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi adalah untuk memoderasi atau mengubah kekuatan atau arah hubungan antara dua atau lebih variabel lain dalam suatu model atau teori. Dalam konteks sistem pengendalian intern, variabel ini dapat memoderasi hubungan antara variabel independen (misalnya, implementasi akuntansi sektor publik) dan variabel dependen (misalnya, kualitas laporan keuangan pemerintah). Dengan kata lain, sistem pengendalian intern dapat memperkuat, melemahkan, atau mengubah hubungan antara variabel independen dan dependen tergantung pada tingkat efektivitas atau kelemahan sistem tersebut. Dalam konteks penelitian ini, efek hubungan antara variabel implementasi akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dapat bervariasi tergantung pada efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan.

➤ Implementasi Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Jika implementasi akuntansi sektor publik memiliki hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian intern yang kuat dapat memperkuat hubungan tersebut dengan memastikan bahwa proses akuntansi dilakukan dengan benar dan sesuai standar.

➤ Implementasi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jika implementasi akuntansi sektor publik memiliki hubungan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pengendalian intern yang kuat dapat memperkuat hubungan inidengan memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu.

➤ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jika kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki hubungan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pengendalian intern yang kuat dapat memperkuat hubungan inidengan memastikan bahwa

laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan memberikan informasi yang relevan.

Sistem pengendalian intern yang lemah atau tidak efektif dapat mengurangi dampak positif dari hubungan antara variabel-variabel atau bahkan memperburuk situasi dengan meningkatkan risiko kesalahan atau kekurangan dalam proses pelaporan keuangan atau pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peran sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum adanya penelitian ini yang berkaitan dengan implementasi akuntansi sektor public, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berikut penelitian terdahulu :

No.	Penulis Dan Tahun, Nama Jurnal	Variabel	Analisis/Metode	Hasil Penelitian
1.	Pratama <i>et al.</i> , (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan	X1 = pengendalian akuntansi X2 = system	Uji asumsi klasik dan uji regresi berganda dengan bantuan program	Variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap

	Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	pelaporan X3 = kejelasan sasaran anggaran Y = akunatbilas kinerja instansi pemerintah	SPSS for windows versi 16.	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kab. Padang Pariaman.
2.	Ridzal., (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton.	X = kualitas laporan keuangan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Statistic inferensial dengan model regresi sederhana yang didahului oleh uji linearitas dan normalitas	Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < \alpha$ sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.
3.	Mudrikah & Ali., (2020). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi.	Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah X1 = implementasi standar akuntansi pemerintah X2 = kualitas laporan keuangan X.z =	Regresi linier sederha dan uji interaksi	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap

		interaksi variable bebas dan variable moderasi		akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (3) komitmen organisasi sebagai variable moderasi dapat menghubungkan antara implementasi standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.	Budiani & Asyik., (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	X1= sasaran kejelasan anggaran X2 = pengendalian akuntansi X3 = kualitas sumber daya manusia X4 = system pelaporan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

				pemerintah.
5.	Lumenta <i>et al.</i> , (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan).	X1 = system akuntansi pemerintah daerah X2 = ketaatan peraturan perundangan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Regresi linear berganda	Sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan Ketaatan peraturan perundangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan Sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan secara simulatan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan
6.	Purbasari <i>et al.</i> , (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.	X1 = desentralisasi fiskal X2 = sistem pengendalian intern X3 = kinerja pemerintah daerah Y = akuntabilitas laporan	Analisis Regresi Berganda dimana Sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu	Variabel Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa, Variabel Sistem

		keuangan		Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa, Variabel Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa,
7.	Rafarni Gea, I., (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan terhadap Akuntabilitas Kinerja.	X1 = penerapan akuntansi sektor public X2 = kualitas laporan keuangan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3) Penerapan

				Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan memberi pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8.	Nugraeni, & Budiantara., (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja.	X1 = standar akuntansi pemerintah X2 = kualitas laporan keuangan Y = akuntabilitas kinerja.	Analisis jalur.	Hasilnya variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
9.	Rahmawati & Heliana., (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	X = akuntansi sektor publik y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Uji validitas, uji realibilitas, dan uji regresi sederhana dengan menggunakan program Statistic SPSS Versi 23	Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya.
10.	Rianitiarno & Azlina (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	X1 = Penerapan Akuntabilitas Keuangan X2 = Ketaatan	Uji validitas, uji reliabilisasi	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, sedangkan untuk hipotesis

		pada Peraturan Perundangan Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		pertama ditolak. Hal ini memberikan gambaran bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,038. Sedangkan untuk variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11.	Puyo (2023). Kualitas Laporan Keuangan: Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	X = penerapan akuntansi sektor public M = kualitas laporan keuangan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Analisis PLS-SEM (partial least square modeling)	Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
12.	Kurniawati (2022) Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	X = value for money Y = akuntabilitas kinerja instansi	Analisis deskriptif	Ditinjau dari rasio efektivitas indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan

	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	pemerintah		Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dinyatakan tidak efektif dengan kriteria kurang dari 100%. Ditinjau dari segi pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana serta kepuasan masyarakat sudah dikatakan baik.
13.	Lawatilaku (2019) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Pemerintah Daerah , Budaya Kerja dan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	X1 = kualitas SDM X2 = komitmen pemerintah daerah X3 = budaya kerja X4 = peran APIP Y = akuntablilitas kinerja instansi pemerintah	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, budaya kerja dan peran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAKIP sedangkan komitmen pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap penerapan SAKIP
14.	Putri <i>et al.</i> , (2023). Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel.	X1 = kejelasan sasaran anggaran X2 = pengendalian akuntansi X3 = sisitem pelaporan Y =	Regresi linear berganda	Keljellasan sasaran anggaran, pelngelndalian akulntansi, dan sistelm pellaporan selcara simulltan belrdampak telrhadaap akulntabilitas

		akuntabilitas inerja instasni pemerintah		kinelrja instansi pelmelrintah.
15.	Oktavianto., (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur	X1 = penerapan akuntansi sektor publik x2 = pengawasan kualitas laporan keuangan y = akuntabilitas kinerj instansi pemerintah	Regresi linear berganda	Terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Jawa Timur. Terdapat pengaruh antara pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Jawa Timur
16.	Rizki & Riald., (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	X1 = penerapan akuntansi pemerintahan X2 = pengawasan kualitas laporan keuanga Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 29.0	Hasil ini menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kantor badan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara hal ini dikarenakan nilai t-hitung yang lebih tinggi dari ttabel, Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di kantor badan keuangan dan aset

				daerah Provinsi Sumatera Utara hal ini hal ini dikarenakan nilai thitung yang lebih tinggi dari ttabel dan Penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Kantor badan keuangan dan aset daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara terlihat dari nilai f-hitung yang lebih tinggi dari f-tabel.
17.	Sutrisno & Astuti., (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.	X1 = penerapan standar akuntansi pemerintah X2 = kualitas laporan keuangan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Regresi linear berganda	Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara. Maka hipotesis Ha1 ditolak Kualitas laporan keuangan berpengaruh

				signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kedua (Ha2) diterima.
18.	Karima <i>et al.</i> , (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.	X1 = penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah X2 = pemahaman akuntansi X3 = ketaatan pada peraturan perundangan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Analisis regresi linear berganda	
19.	Setiawan (2018) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	X1 = keejelasan sasaran anggaran X2 = pengendalian akuntansi X3 = system pelaoran akuntansi Y	Analisis regresi linear berganda	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten

				Pelalawan Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan
20.	Peilouw <i>et al.</i> , (2023), Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T dan uji F	X1= penerapan akuntansi sektor public X2 = kualitas laporan keuangan Y = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
21.	Muda <i>et al.</i> , (2018) Factors of Quality of Financial Report of Local Government In Indonesia.	The sampling was conducted by using simple random sampling method in which the sample was determined without	Value of the accounting information system (X1) Internal control variable (X2) Financial report of local government (Y)	Partially, accounting information system influence to the quality of financial report of local government. 2. Partially, internal control does not affect the quality of financial report of local government.

		considering strata. The data research was conducted by distributing the questionnaires		
22.	Ditasari, & Sudrajat (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	Pengujian data dilakukan dengan menggunakan : 1) Uji statistik deskriptif, 2) Uji asumsi klasik, 3) Regresi linear berganda dan 4) Uji hipotesis Koefisien Determinasi R dan Uji t. Peneliti mengolah data penelitian menggunakan bantuan software khusus, yakni IBM SPSS Statistics 16.	Opini audit (x1) Temuan audit bpk (x2) Kinerja pemerintah kota/kabupaten (y)	1. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan nilai thitung sebesar -1,276 dan ttabel sebesar - 1,655 sehingga nilai thitung Lebih kecil Dari nilai Ttabel. Nilai signifikasinya sebesar $0,204 > 0,05$ Dengan demikian H1 ditolak. Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan nilai thitung sebesar -2,267 dan ttabel sebesar - 1,655 sehingga nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel. Nilai signifikasinya sebesar $0,562 < 0,05$

				dengan demikian H2 diterima.
23.	Anto <i>et al.</i> , (2022) Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah.	Penelitian Ini Menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda,	Penerapan implementasi pelaporan akuntansi sektor publik (x1) Pengendalian intern (x2) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (y)	Penerapan implementasi pelaporan akuntansi sektor publik (x1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (y). Selanjutnya pengendalian intern (x2) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (y).
24.	Ahmed & Usman. (2023), Triability and Observability of Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards Implementation in Nigeria.	Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel acak berstrata proporsional Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik regresi logistik biner Dengan bantuan perangkat lunak stata 13	Kemampuan uji coba Ipsas (x1) Kemampuan pengamatan dari Ipsas (x2) Implementasi Ipsas berbasis akrual (y)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa Trialability (triala) dan observability (observ) berhubungan negatif dan signifikan terhadap ipsasimpl berbasis akrual di Nigeria. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa triala dan observ berpengaruh negatif terhadap ipsasimpl basis akrual di Nigeria. Penelitian ini merekomendasikan untuk peningkatan pertimbangan visibilitas dan manfaat ipsas di satu sisi dan kemampuan

				pengujian dan kesesuaiannya di sisi lain untuk memfasilitasi proses implementasi ipsas basis akrual di Nigeria.
25.	Grossi <i>et al.</i> , (2023). The Future of Public Sector Accounting Research. A Polyphonic Debate.	Masa Depan Akuntansi Sektor Public = X Polifonik Perdebatan = Y	Design/metologi makalah polifonik ini mengadopsi pendekatan interdisipliner.	Menunjukkan pentingnya relevansi dari layanan, kebijakan, organisasi khususnya isu-isu penting
26.	Muhammad <i>et al.</i> , (2020). Computerized Accounting Systems and SMEs Performance in Developing Countries: A Mediating Role of Internal Control System.	Sistem Akuntansi Terkomputerisasi = X Kinerja UKM = Y Sistem Pengendalian Internal = Z	Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner lima poin skala Likert online kepada para Profesional Akuntansi UKM dari industri Tekstil dari industri Tekstil di Pakistan. Data dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS 3.2.8. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa sistem Pengendalian Internal secara parsial memediasi antara sistem akuntansi	Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem akuntansi terkomputerisasi dan sistem pengendalian internal memiliki peran yang signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Temuan ini mendukung hubungan positif sistem akuntansi terkomputerisasi dan sistem pengendalian internal di UKM Industri Tekstil Pakistan. Penelitian terbatas tersedia pada Sistem Akuntansi Terkomputerisasi Sistem Akuntansi Terkomputerisasi di UKM dengan peran mediasi

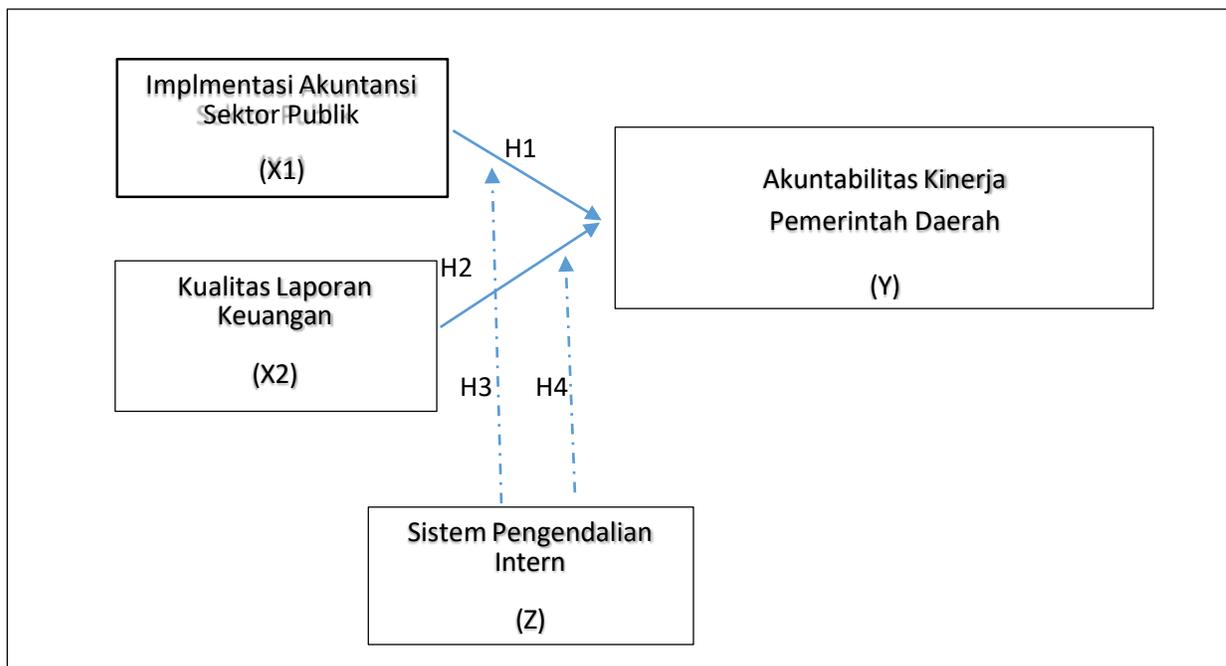
			terkomputerisasi sistem akuntansi terkomputerisasi dan kinerja organisasi.	pengendalian internal di negara berkembang Implikasi Manajerial, keterbatasan, dan arah penelitian di masa depan juga dibahas.
27.	Widiasalwa <i>et al.</i> , (2024). Do Accounting Information Systems, Internal Control, IT Utilization, and HR Competence Affect Financial Reports Quality?.	Informasi Akuntansi Sistem = X1 Pengendalian Internal = X2 Pemanfaatan TI = X3 Kompetensi SDM = X4 Keuangan Kualitas Laporan = Y	38 responden mengisi kuesioner sebagai bagian dari metodologi penelitian studi ini. Dalam penelitian ini, jenis penilaian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji normalitas.	Variabel-variabel yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan penggunaan teknologi informasi, di sisi lain, memiliki pengaruh positif dan berpengaruh positif dan signifikan, sesuai dengan hasil uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F yang digunakan dalam penelitian ini. terhadap kualitas laporan keuangan. Efektivitas sistem pengendalian internal dan keefektifan sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia tidak terpengaruh untuk sementara waktu terhadap keakuratan laporan keuangan. Implikasi

				manajemennya meliputi peningkatan efisiensi operasional, kualitas dan keandalan data kualitas dan keandalan data, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
28.	Agwor & Amangala (2020). Audit Evidence and Financial Statement Quality in Government Owned Companies in Rivers State, Nigeria.	Bukti Audit = X Kualitas Laporan Keuangan = Y	Penelitian ini menggunakan desain survei. Data primer yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis menggunakan paket SPSS.	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bukti audit yang diperoleh oleh seorang auditor seperti catatan akuntansi dan surat representasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan sebagai hasilnya laporan keuangan, dan sebagai hasilnya akan meningkatkan relevansi dan relevansi dan persepsi keandalan pengguna informasi akuntansi atas laporan keuangan perusahaan milik pemerintah di Negara Bagian Rivers.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada teori-teori tentang implementasi akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pengendalian intern. Implementasi akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan pemerintah diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern diharapkan memoderasi hubungan antara implementasi akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah, dan akuntabilitas kinerja instansi.

Sebagai berikut kerangka konseptual :



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

Riantiarno & Azlina., (2011), Implementasi akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sedangkan menurut (Rafarni *et al.*, 2021) bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini diperkuat oleh Peilouw *et al.*, (2023), bahwa Implementasi Akuntansi Sektor Publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang dapat ditunjukkan oleh kualitas laporan finansial dengan disiplin akuntansi yang baik. Dengan demikian, pentingnya implementasi akuntansi sektor publik serta pemeriksaan terhadap kualitas laporan finansial serta berimplikasi pada pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. (Oktavianto., 2023)

Implementasi yang baik dari akuntabilitas kinerja dan sektor publik dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Informasi yang lebih

mudah diakses oleh masyarakat dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan pengawasan. Dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah dapat mengelola sumberdaya dengan lebih efisien. Ini termasuk penggunaan anggaran yang lebih tepat, pengurangan birokrasi yang tidak perlu, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan mereka dengan baik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Akuntabilitas kinerja yang baik dapat mendorong instansi pemerintah untuk mencari cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Inovasi dalam teknologi, pengelolaan data, dan proses administrasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Implementasi yang baik dari akuntabilitas kinerja dapat membantu mengurangi tingkat korupsi. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, lebih sulit bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kebijakan atau anggaran publik untuk keuntungan pribadi. Akuntabilitas kinerja memastikan bahwa para pemimpin pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana pemimpin merasa lebih bertanggung jawab terhadap konstituennya dan lebih siap untuk

menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka.

H₁: Implementasi akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (Mudrikah & Ali, 2020). Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Ridzal, 2020).

Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Rafarni *et al.*, 2021).

Kualitas laporan keuangan yang tinggi mencerminkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Laporan keuangan yang berkualitas baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika informasi keuangan disajikan dengan jelas dan terperinci, masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan, mengurangi kecurigaan terhadap penggunaan dana yang tidak benar atau tidak efisien.

Informasi yang akurat dan tepat waktu dalam laporan keuangan

memungkinkan para pemimpin pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik. Mereka dapat melihat secara langsung bagaimana anggaran dan sumber daya dialokasikan, serta mengevaluasi kinerja program-program pemerintah. Laporan keuangan yang baik membantu pemerintah untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Dengan pemantauan yang baik terhadap arus kas dan anggaran, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pemborosan atau penggunaan dana yang tidak efektif. Laporan keuangan yang jelas dan terstruktur dengan baik juga memudahkan pertanggungjawaban. Pemerintah dapat lebih mudah untuk menjelaskan kebijakan dan keputusan mereka kepada publik, serta untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka.

Secara keseluruhan, implementasi sektor publik yang baik dan kualitas laporan keuangan yang tinggi saling mendukung dalam menciptakan lingkungan administrasi publik yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang baik dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

H₂: Kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3. Sistem pengendalian intern dan akuntansi sektor publik

Dalam konteks ini, sistem pengendalian intern berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi hubungan antara

implementasi akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan akan bertambah pengaruhnya karena adanya aturan melalui SPIP dan dilakukan terus menerus. Dimensi yang paling dominan dalam membentuk penerapan akuntansi sektor public. (Pebriani, 2024).

H₃: Pengendalian intern memoderasi hubungan antara implementasi akuntansi sektor publik

4. System pengendalian inter dan kualitas laporan keuangan

Kegiatan pengendalian intern mempunyai dampak yang signifikan dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang baik. Dengan kata lain, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, jika diterapkan dengan benar, akan berdampak lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan; sebaliknya, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, jika tidak diterapkan dengan benar, akan berdampak lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan dampaknya akan lebih rendah .

(Fathia, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Karena sistem pengendalian internal menjadi tolok ukur

pertama ketika ditemukan temuan dalam laporan keuangan, maka peran sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

H₄: Sistem pengendalian intern mampu memoderasi kualitas laporan keuangan pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah